



Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pertanahan secara Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul

pada Tahun 2014

FRISKA ARIESTA ARITEDI, Prof.Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si.

Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN SECARA

MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL

PADA TAHUN 2014

Oleh:

Friska Ariesta Aritedi

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Seiring dengan berkembangnya suatu masyarakat, kebutuhan akan tanah semakin meningkat. Tanah sebagai komoditas ekonomi menjadi sangat rawan dalam menimbulkan sengketa. Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa pertanahan telah banyak ditempuh dan menghasilkan hasil yang positif. Badan Pertanahan Nasional, lembaga pemerintahan non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan, menyelenggarakan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan. Pengaturan mengenai fungsi ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Untuk menyelenggarakan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor Pertanahan di kabupaten/kota.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang – undangan terkait untuk memecahkan masalah. Penelitian ini dilakukan dengan cara memadukan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Hasil dari penelitian hukum ini adalah mediasi sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, namun pada penerapannya terdapat beberapa kebijakan yang berbeda.

Kata kunci: Mediasi, Sengketa Pertanahan



Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pertanahan secara Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul pada Tahun 2014

FRISKA ARIESTA ARITEDI, Prof.Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si.

Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

IMPLEMENTATION OF LAND DISPUTE RESOLUTION THROUGH MEDIATION IN BANTUL REGION LAND OFFICE 2014

By:

Friska Ariesta Aritedi

Faculty of Law Universitas Gadjah Mada

As society becomes more advanced, the demand of land increases. Land as an economic commodity becomes potentially problematic. Mediation as a land dispute resolution is the most frequently used alternative and positive outcome. National Land Agency (NLA), non-ministerial government organisation in charge of land management, holds the function of policy making and policy implementation in land dispute control and reconciliation. Further regulation about this function is stated in *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011* about Land Dispute Management, Observation, and Reconciliation. To implement NLA function in municipal level, Land Office is created.

In this research, the author used a juridical – empirical approach which means a legal research by using a fact approach, and then it is examined and analyzed based on related legal and regulations as a reference to solve the problems. This research was done by mixing the secondary data which was obtained from the library research and the primary data which was obtained from the field research. The result of this legal research is land dispute mediation in Bantul Region Land Office is done according to the regulation. However, there are variations in policy implementation.

Keywords: Mediation, Land Dispute